

# PENGELOLAAN BANTUAN SISWA MISKIN DI SMP MUHAMMADIYAH 8 WONOGIRI

oleh

\*) Heru Mahmudi Santoso; \*\*) Yetty Sarjono; \*\*\*) Wafroturrohmah

\*) Guru SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri

\*\*) Dosen Prodi Pendidikan Akuntansi

\*\*\*) Dosen Prodi Pendidikan Akuntansi

## *Abstract*

*The aims of the research are to: 1) describe the preparation of management of Student Financial Aid Program; 2) describe the activities of management of Student Financial Aid Program; and 3) describe the management report of Student Financial Aid Program at SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri. The research method applied was descriptive qualitative study by using an ethnographic approach. The subject of the research was SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri. The data were collected through in-deep interview, observation and documentation. The informants of the research are: the principal, vice-principal, and teachers, who have the role in Poverty Student Aids management of SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri. The data were obtained and analyzed by using an interactive model which included data collection, reduction, verification and drawing conclusion. The research result showed that; 1) The preparation of management of Student Financial Aid Program at SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri was started by conducting a coordination among the principal, teachers, staffs, and team. Then they prepared some data related to students' background which would be promoted to get Student Financial Aid Program ; 2) The activities in managing of The Student Financial Aid Program was started by planning, actuating, distributing, recording, controlling, and reporting of Student Financial Aid Program as a form of responsibility of the team in managing Student Financial Aid Program, and 3) In the end of management process of Student Financial Aid Program, school or the team had a responsibility to record and report the outcome of the management of Student Financial Aid Program at SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri. By reporting the outcome, it meant that the management of Student Financial Aid Program had been finished. The whole management activities of Student Financial Aid Program were based on the principles of School Financial Management, those are; transparency, accountability, effectively, efficiency. And effective*

**Keywords:** *financial aid; management; poor students.*

## **Pendahuluan**

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama bagi pengembangan sumber daya manusia. Karena pendidikan diyakini mampu meningkatkan sumber daya manusia untuk menciptakan manusia produktif yang mampu memajukan

bangsanya (Kunaryo, 2000: 21).

Pendidikan dalam arti luas didalamnya arti luas terkandung pengertian mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang pokok (Darajat, 2000: 100).

Menurut UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada pasal 1 ayat 26 disebutkan warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada pasal 4 ayat 1, pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa”.

Dari beberapa hal tersebut bisa kita lihat bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah dan harus dipastikan sampai ke semua warga negara. Pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan maka arah pendidikan masa depan harus mampu memberikan jalan pemecahan masalah bagi pembangunan yakni tersedianya sumber daya insan yang berkualitas sehingga mampu mengantisipasi setiap perubahan yang cepat (Soetarno, 2002: 1). Selain itu, pendidikan merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia karena pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, emosional serta moral dan

ketakwaan manusia (Sa’ud & Makmun, 2005: 6).

Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Namun, sampai dengan saat ini masih banyak orang miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu, hal ini disebabkan antara lain karena mahalnya biaya pendidikan. Disisi lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yang dikenal dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Pada pasal 34 ayat 2 tertera bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan, bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Keberhasilan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, anggota masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah dan masyarakat menyediakan tempat belajar yaitu sekolah. Sekolah

menampung siswa-siswinya dari berbagai macam latar belakang dan kondisi yang berbeda. Pada umumnya anak-anak yang berasal dari keluarga menengah ke atas mendapatkan pengarah dan bimbingan yang cukup baik dari orang tua mereka, sedangkan anak-anak yang berasal dari keluarga ekonomi rendah kurang mendapat bimbingan dan perhatian yang cukup dari orang tua mereka karena orang tua mereka lebih memusatkan perhatiannya pada bagaimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Konsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat). Seiring meningkatnya beban subsidi BBM yang harus dibayar pemerintah karena semakin meningkatnya harga minyak dunia, pada bulan Maret dan Oktober 2005 Pemerintah melakukan pengurangan subsidi BBM secara drastis. Masyarakat langsung merasakan dampak kenaikan harga BBM berupa melambungnya kebutuhan pokok dan pendidikan. Dalam rangka mengatasi dampak kenaikan harga BBM, pemerintah merealokasikan anggarannya ke empat program besar, yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan

Subsidi Langsung Tunai (SLT). Sebagai konsekuensi dalam bidang pendidikan, maka pemerintah selain mengeluarkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan yang dibayar oleh masyarakat dengan tetap mempertahankan mutu pendidikan.

Setelah Pemerintah menetapkan kebijakan BOS sebagai salah satu pendukung untuk menuntaskan program Wajar Dikdas 9 Tahun, ternyata kebijakan BOS tersebut belum mampu menjamin seluruh masyarakat untuk dapat sekolah, terutama bagi anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin. BOS yang diberikan kepada lembaga penyelenggara Wajar Dikdas setara SD/MI dan SMP/MTs, hanya mampu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus dikeluarkan masyarakat, tetapi tidak mampu untuk membebaskan seluruh biaya pendidikan, sehingga banyak siswa miskin yang tidak sanggup atau melanjutkan pendidikannya karena harus mengeluarkan biaya untuk buku, transportasi, seragam madrasah, sepatu, buku tulis atau biaya lainnya yang tidak dapat dipenuhi dari dana BOS. Sementara kita semua melihat bahwa mayoritas siswa berasal dari keluarga kurang mampu bahkan dapat dikategorikan miskin.

Untuk mencegah terjadinya anak putus sekolah yang disebabkan faktor ketidakmampuan ekonomi dan sekaligus menarik anak usia sekolah yang tidak sekolah agar masuk sekolah serta dalam rangka pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh pendidikan, pemerintah melalui APBN menetapkan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang diberikan kepada sebagian siswa miskin di tingkat Sekolah Dasar/MI hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/MA, walaupun jumlah siswa yang mendapatkan bantuan ini masih sangat terbatas. Dengan program BSM ini, diharapkan dapat membantu sebagian siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin di dalam membiayai sebagian kebutuhan pendidikannya sehingga dapat menyelesaikan pendidikannya, bahkan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian yang berjudul Pengelolaan Bantuan Siswa Miskin di SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri ini, digunakan metode penelitian kualitatif dengan desain. Penelitian kualitatif secara umum sering disebut sebagai penelitian kualitatif deskriptif karena dalam mengembangkan pemahaman, penelitian

kualitatif cenderung tidak memotong halaman cerita dan data lainnya dengan simbol-simbol angka (Sutopo, 2006: 4). Penelitian kualitatif memfokuskan pada pengumpulan informasi tentang keadaan atau realita yang sedang berlangsung, jadi bentuk penelitian ini adalah naturalistik.

Menurut Guba (1978) dan Wolf (1979), "*qualitative research is frequently called naturalistic because the researcher frequents places where the events he or she is interested in naturally occur*" (Bogdan dan Biklen, 1998: 3). Penelitian kualitatif sering dinamakan naturalistik karena peneliti datang ke tempat penelitian di mana realita sedang berlangsung. Sedangkan Creswell (1994: 162) mengatakan, "*qualitative research occurs in natural setting, where human behavior and events happen.*" Penelitian kualitatif dilakukan pada lingkungan natural, dimana manusia melakukan aktifitas.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

BSM adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu. BSM bertujuan agar siswa tidak mampu dapat terus melanjutkan pendidikan di sekolah. Program ini bersifat bantuan bukan beasiswa, karena jika beasiswa bukan berdasarkan kondisi ekonomi siswa, melainkan berdasarkan prestasi". Sumber

dana BSM dari APBN. BSM terdiri dari dua macam, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengelola BSM dan Beasiswa Bakat dan Prestasi sedang dari Kementerian Agama disebut sebagai Bantuan Beasiswa Siswa Miskin yang disatukan pengelolaannya antara bantuan dengan beasiswa. Dalam penyaluran BSM, sekolah mewanti-wanti pada siswa agar BSM bisa dimanfaatkan dengan benar seperti petunjuk yang diberikan oleh pemerintah. BSM dapat dimanfaatkan untuk pembelian perlengkapan siswa misalnya buku pelajaran, alat tulis, sepatu dan tas. Atau untuk biaya transportasi ke sekolah maupun uang saku siswa untuk sekolah. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program BSM, pengelola wajib melaporkan hasil kegiatannya ke pihak terkait. Tim Pengelola harus melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan BSM ke Tim Kabupaten dalam hal ini Dinas Pendidikan meliputi statistik penerima BSM, penyaluran dan penyerapan BSM, pemanfaatan dana oleh siswa penerima BSM, hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Evaluasi

dilakukan setiap triwulan atau per semester. Dana yang digunakan akan dipertanggungjawabkan kepada sumber dana. Jika dana tersebut diperoleh dari orang tua siswa, maka akan dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah kepada orang tua siswa. Begitu pula jika dana tersebut bersumber dari pemerintah maka akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.

Maksud dan tujuan adanya BSM adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan serta menekan angka putus sekolah. BSM sangat berperan untuk memotivasi dalam meningkatkan prestasi belajar siswa jika dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Tujuan yang pokok membantu memenuhi kebutuhan siswa, mencegah siswa dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan ekonomi, memberi peluang dan kesempatan siswa untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikan SMP, dan membantu kelancaran program sekolah. Dalam penentuan penerimaan BSM, guru maupun karyawan sekolah mengadakan survei mengumpulkan data siswa untuk diseleksi layak tidaknya siswa bersangkutan mendapat BSM. BSM diberikan kepada siswa yang tergolong miskin dan sangat membutuhkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan mereka

mendapatkan pendidikan yang layak. Tahap awal pengelolaan BSM, di mulai dengan suatu perencanaan dan persiapan. Perencanaan meliputi pembentukan panitia, kuota siswa yang akan diusulkan, data siswa yang akan diusulkan dan semua hal yang berkaitan dengan BSM. Pengorganisasian menentukan bagaimana aturan dan tata kerjanya. Pelaksanaan menentukan siapa yang terlibat, apa yang dikerjakan, dan masing-masing bertanggung jawab dalam hal apa. Pengawasan dan pemeriksaan mengatur kriterianya, bagaimana cara melakukannya, dan akan dilakukan oleh siapa. Kegiatan umpan balik merumuskan kesimpulan dan saran-saran untuk kesinambungan terselenggaranya Manajemen Operasional Sekolah. Untuk menetapkan siswa prima BSM ada tahapan-tahapan. Tahap Pertama menyusun daftar siswa kelas 7, 8, 9 yang dinilai berhak menerima bantuan sesuai dengan kriteria diantaranya, siswa yang terancam putus sekolah karena kesulitan biaya, siswa yang tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain, dan siswa yang telah dibebaskan dari segala jenis iuran sekolah. Tahap Kedua menyeleksi siswa dari daftar tahap pertama, sehingga diperoleh jumlah siswa penerima BSM sesuai dengan alokasi penerima BSM yang telah ditetapkan.

Seperti di ungkapkan oleh bendahara bahwa : “Rapat koordinasi yang diselenggarakan sekolah untuk membentuk pengelola dana BSM. Petugas pengelola dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk mengelola dari seleksi pengusulan penerima, pendistribusian, hingga tahap pelaporan baik secara administrasi maupun pelaksanaan pemberian BSM. Sebelum pengusulan untuk siswa yang nantinya menerima BSM kami mempersiapkan terlebih dahulu apa yang harus kami lakukan, mengkoordinasikan dengan guru, wali kelas, komite sekolah, kesiswaan, guru BK, dan pengelola lainnya untuk menentukan kuota jumlah siswa yang akan diusulkan dalam mendapatkan dana BSM. Sesuai juknis dengan metode penetapan variabel dan penilaian. Pengambilan BSM dilakukan di lembaga penyalur yaitu kantor Pos. BSM harus disalurkan secara utuh, tanpa ada potongan atau pungutan dan oleh pihak manapun, serta dalam bentuk apapun. Pengambilan BSM dilakukan sekaligus untuk enam bulan dengan menandatangani bukti penerimaan yang disediakan oleh lembaga penyalur. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program BSM. Pengelola di SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada

pihak terkait. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah berkaitan dengan statistik penerima BSM, penyaluran dan penyerapan dana BSM, pemanfaatan dana oleh siswa penerima BSM, hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. Untuk mencatat segala kegiatan dari penerimaan sampai penyaluran dan BSM, maka pengelola membuat pembukuan untuk mengontrol dan mendokumentasikan segala kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dana BSM yang selanjutnya dijadikan bahan evaluasi maupun laporan sebagai hasil kegiatan yang sudah di laksanakan.

Hasil wawancara dengan salah satu guru di SMP Muhammadiyah 8 Wonogiri menyebutkan : “Sekolah maupun siswa penerima BSM harus memenuhi Persyaratan yang berkaitan dengan siswa calon penerima BSM diantaranya adalah siswa SMP dan SMPLB negeri dan swasta kelas 7 sampai 9 dari keluarga miskin, tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain, telah dibebaskan dari segala jenis iuran sekolah. Sedangkan persyaratan Sekolah Peserta Program BSM adalah sekolah yang mempunyai siswa dari keluarga miskin, sekolah yang memiliki surat ijin operasional atau kelembagaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan untuk sekolah umum. Dalam

pendistribusian dana BSM siswa bisa mengambil sendiri secara langsung di lembaga penyalur yang ditunjuk yaitu Kantor Pos dengan membawa salinan SK Penetapan Siswa Penerima BSM dan lampirannya. Sedangkan pengambilan dana BSM secara kolektif oleh Sekolah harus menggunakan SK kolektif yang sudah ditandatangani siswa penerima dana BSM, tanpa meterai, diketahui oleh Ketua Komite Sekolah. Pengambilan dana BSM secara langsung oleh siswa lebih diutamakan. SK kolektif harus dilengkapi dengan salinan SK Penetapan Siswa Penerima BSM dan lampirannya. Sebelum usulan siswa yang menerima BSM dipersiapkan, terlebih dahulu dirapatkan dengan guru, komite sekolah, dan pengelola untuk menentukan kuota atau jumlah siswa yang diusulkan. Hal ini kami maksudkan agar supaya dalam pengelolaan BSM ini bisa tepat sasaran. Dalam pemanfaatannya BSM dapat dimanfaatkan untuk membeli perlengkapan siswa misalnya buku pelajaran, alat tulis, sepatu dan tas. BSM bisa digunakan untuk biaya transportasi siswa ke sekolah maupun uang saku siswa kesekolah. Dana BSM dapat dibatalkan jika siswa penerima BSM berhenti sekolah, menerima beasiswa dari instansi/sumber lain, didakwa dan terbukti melakukan tindakan kriminal,

mengundurkan diri, dan tidak lagi masuk dalam kriteria siswa miskin. Pengambilan dana BSM yang dilakukan secara kolektif oleh sekolah, sekolah harus menyerahkan BSM kepada siswa yang berhak paling lambat satu minggu setelah diambil, dengan membuat bukti penyerahan BSM yang ditandatangani oleh siswa penerima BSM. Selanjutnya BSM yang belum diambil oleh sekolah sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dikembalikan oleh lembaga penyalur ke rekening pengelola dana dekonsentrasi untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

“Maksud dan tujuan Program BSM adanya niat pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pada anak usia sekolah yang tidak mampu menikmati pendidikan secara utuh dan meningkatkan mutu pendidikan serta menekan anak putus sekolah sehingga dapat mampu untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas seperti pada siswa umumnya”. Usulan anak penerima BSM diatur berdasarkan rapat antara kepala sekolah, guru, dan panitia. Penerima BSM adalah siswa miskin yang memenuhi kriteria sesuai pedoman atau petunjuk teknis. Indikator yang dipakai adalah; siswa yang berasal dari keluarga miskin, jarak tempat tinggal jauh dari sekolah, kondisi siswa yatim atau

piatu, pertimbangan lain misalnya kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak korban PHK, mempunyai lebih dari tiga bersaudara yang berusia di bawah 18 tahun, dan indikator lokal lainnya. Tetapi yang diutamakan adalah bagi siswa yang memiliki Kartu Miskin. Hasil penetapan siswa penerima BSM dituangkan dalam bentuk SK Siswa Penerima BSM dilengkapi dengan lampiran Berita Acara dan Daftar Siswa Penerima BSM. Ada tahapan tahapan persiapan dalam menentukan siswa penerima BSM, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber yang kemudian di *cross check*-kan dengan melakukan survei maupun penggalian informasi tentang latar belakang siswa calon penerima BSM maupun kondisi ekonomi siswa calon penerima BSM. Diharapkan dengan cara seperti ini penyaluran BSM bisa tepat sasaran.

### **Kesimpulan**

Dalam Pengelolaan BSM perlu dipersiapkan terlebih dahulu hal-hal yang terkait dengan kegiatan Pengelolaan BSM. Koordinasi dan segala dokumen yang dibutuhkan perlu dipersiapkan agar dalam pelaksanaan Pengelolaan bisa tercapai seperti yang diharapkan.

Pengelolaan BSM diatur oleh pemerintah melalui Buku Pedoman BSM

dan Juknis BSM. Hal ini dimaksudkan supaya ada keseragaman dalam pengelolaan BSM. Pengelolaan BSM merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan perjalanan kegiatan pendidikan di sekolah melalui rangkaian proses, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Adapun tujuan dari pengelolaan tersebut adalah untuk memperoleh, dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan, agar bisa menggunakan dana secara efektif dan tidak melanggar

aturan, dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Laporan keuangan harus tranparan dan akuntabel dan harus mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. Pelaporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian kegiatan pengelolaan. Pengelolaan BSM dilampiri dengan bukti-bukti dokumen yang mendukung dalam kegiatan pengelolaan tersebut. Dengan adanya laporan dan bukti pendukung yang transparan dan akuntabel berarti kegiatan Pengelolaan BSM sudah selesai dilaksanakan dan didokumentasikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ami, Amalia Hani. 2012. *Pengelolaan Keuangan Pendidikan* <http://amiamaliahanii.wordpress.com/2012/05/30/pengelolaan-keuangan-pendidikan/> (diakses pada 6 September 2013 pukul 11.44).
- Anonim, 2010. *Panduan Pelaksanaan Beasiswa Miskin Bagi SMP*
- Arikunto, Suharsimi. 2004. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bogdan, Robert C & Biklen, Sari Knopp, 1988, *Qualitative Research For Education*, A Viacom Company 160 Goul Street, USA.
- Bafadal, Ibrahim. 2006. *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah*. Jakarta : Grafika Offset.
- Borg, Rody J. & Borg, Mary O. 2012. *Closing the achievement gap between high-poverty schools and low-poverty schools*. Academic and Business Ethics, College Teaching, and the International Journal of Industrial Organization.
- Collins, J. Michael. 2012. *Effects of mandatory financial education on lowincome clients*. Assistant Professor of Consumer Science at the University of Wisconsin–Madison, Faculty Director of the Center for Financial Security, and an IRP. Institute for Research on Poverty 1180 Observatory Drive 3412 Social Science Building University of Wisconsin Madison, Wisconsin 53706 (608) 262-6358 Fax (608) 265-3119 affiliate.
- Darajad, Zakiah. 1996. *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Firdaus, Andri. 2007. *Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kabupaten Brebes (Studi Kasus pada SD Kota, Pinggir Kota dan Terpencil)*.
- Hadikusumo, Kunaryo. 1999. *Pengantar Pendidikan*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Hamalik, Oemar. 1990. *Pengembangan Kurikulum: Dasar dan Pengembangannya*. Bandung: MandarMaju.
- Huberman, A.M. dan Miles, M.B. 2007. *Qualitatif Data Analys*. London: Sage Publications. Terjemahan Oleh Tjetjep Rohendi Rosidi. Tahun 2007. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Lina, Chandra A. 2008. *Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Ditinjau Dari Aspek Hukum Keuangan Negara (Studi Kasus Sd Tambaharjo 02 Kabupaten Pati)*.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prashant, Loyalka. 2012. *The distribution offinancial aid in China: Is aid reaching poor students?.* China Institute for Educational Finance Research, #5 Summer Palace Rd., Rm. 406, Education Building, Peking University, Beijing 100871, China.
- Soetarno, 2002. *School Based Management Dalam Rangka Menuju Otonomi Daerah*. Makalah Seminar Pendidikan Dalam Rangka Memperingati Hardiknas 11 Mei 2002.
- Spradley, James P. 2007. *Metode Etnografi*. Jakarta: Tiara Wacana.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutama, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Surakarta: Fairus Media.
- Sutopo,H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif ; Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.